

BAB III

KONDISI ETNIS TIONGHOA ISLAM SEBELUM REFORMASI 1998

A. Kondisi Ekonomi

Masyarakat Tionghoa pada umumnya bermata pencaharian sebagai pedagang, ini timbul dari turun temurun mereka pada saat datangnya ke Nusantara. Sehingga banyak dari penduduk pribumi menjadi iri dengan keberhasilan yang mereka capai, maka timbul lah kesenjangan social dan sifat iri. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, seorang jurnalis dari Belanda mencari penyebab kemiskinan di Hindia Belanda, dan ternyata yang disalahkan bukan kolonial melainkan etnis Tionghoa.¹ Orang Tionghoa sejak awal kedatangannya cenderung menetap di Wilayah pedalaman. Di lingkunganya yang “serba baru” tersebut, orang Tionghoa diharuskan untuk bertahan hidup. Salah satu jalan untuk tetap dapat bertahan adalah mereka harus dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Di tanah asalnya, orang Tionghoa berprofesi sebagai petani. Namun keadaan setelah di Indonesia mereka harus mencari alternatif lain untuk dapat bertahan hidup di negeri orang.

Sejak dahulu orang Tionghoa di Hindia Belanda, terutama di Jawa, harus mencari nafkah terutama dibidang selain pertanian, yaitu dalam bidang pertukangan dan perdagangan perantara. Hal itu terjadi karena Jepang membatasi orang Tionghoa dalam berpolitik. Menurut Ong Eng Die dan Tri wahyuning, orang Tionghoa pada masa kolonial sampai pendudukan Jepang cenderung

¹ Benny G. Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik*, (Elkasa: Jakarta, 2002), hlm.571.

menjadi pedagang perantara, dimana ia berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan ekspor dan impor Eropa di satu pihak, dengan konsumen serta produsen pribumi di lain pihak, menuju ke dua arah.²

Sebagian besar orang Tionghoa di Hindia Belanda mencari nafkah di bidang perdagangan distribusi dan koleksi, yang telah menjembatani jurang lebar antara perdagangan internasional dan juga antara produsen-konsumen. Cabang ini menjadi berkembang pesat berkat peran orang Tionghoa. Menurut Helfferich, orang Tionghoa tidak bisa tidak harus ada dalam kehidupan ekonomi negara jajahan; bilamana tidak ada, mereka harus diadakan, sebab tanpa adanya orang Tionghoa, perkembangan ekonomi di Hindia Belanda akan jauh terbelakang dari keadaan saat ini.³ Orang Tionghoa adalah pemimpin dalam dunia usaha di Hindia Belanda: mereka memegang monopoli atas perdagangan kecil, dan bertindak sebagai perantara antara importir, eksportir, produsen serta konsumen pribumi pada masa pendudukan Jepang. Moll dalam pidatonya mengenai “Orang Tionghoa di Hindia Belanda” mengatakan “untuk kehidupan ekonomi, kehadiran orang Tionghoa itu sendiri sangat penting artinya, dulu dan sekarang”.⁴

Sementara itu pada masa presiden Soekarno, pada November 1959 menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 10. Peraturan ini berisi larangan bagi orang-orang asing yang pada dasarnya ditujukan untuk etnis Tionghoa untuk

² Ong Eng Die, “Peranan Orang Cina dalam Perdagangan” dalam Mely G.Tan. *Golongan Etnis Cina di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1979, hlm, 31.

³ Mely G. Tan, *Golongan Etnis Cina di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1979, hlm, 36.

⁴ *Ibid.*

tidak berdagang di daerah perkotaan maupun di daerah pedalaman dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1960. Dari peraturan yang semena-mena tersebut membuat etnis Tionghoa merasa goyah dan mengejutkan di berbagai kalangan Tionghoa di Indonesia. Namun mereka tidak patah arang, meskipun ditentang mereka tetap berdagang demi melangsungkan hidup.⁵

Di tahun 1965, kondisi ekonomi Indonesia mengalami kejomplangan dan semakin kacau balau akibat dari pertentangan elite politik di pusat Jakarta. Dari masalah tersebut juga menyebar ke pelosok-pelosok daerah, dalam masa akhir pemerintahan Soekarno banyak sekali yang ingin menurunkan jabatan nya, baik dalam cara baik maupun tidak baik. Pada 30 September terjadi peristiwa yang sering disebut G30S/PKI, presiden Soekarno langsung menunjuk Letkol Soeharto untuk menuntaskan kasus yang terjadi. Sementara itu kondisi ekonomi semakin tidak stabil akibat nya banyak utang negara yang semakin menumpuk, sehingga pemerintah mengambil inisiatif dengan menaikkan harga barang pokok untuk tujuan menstabilkan ekonomi. Kebanyakan para pedagang berasal dari etnis Tionghoa.

Dalam hal ini masyarakat kecil yang menjadi imbas dari krisis yang timbul di negeri ini, kemudian para mahasiswa membentuk organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Tujuan mereka sungguh mulia, salah satunya yaitu turunkan harga bahan pokok yang semakin menyengsarakan rakyat. Etnis Tionghoa yang menjadi salah satu sasaran kelompok unjuk rasa tersebut. Di dalam pemerintahan Soekarno juga terdapat dari kalangan etnis Tionghoa yaitu

⁵ Mely G Tan, (ed). *Golongan Etnis Tionghoa Di Indonesia: Suatu masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*, Jakarta: PT Gramedia, 1979, hlm. 205.

Oei Tjoe Tat sebagai menteri pada kabinet 100 menteri dan Lie Kiat Teng sebagai menteri kesehatan.⁶

Dalam masa pemerintahan Orde Baru, presiden Soeharto mengajak pengusaha-pengusaha yang berasal dari Tionghoa untuk memulai kebijakan ekonominya. Dan tidak bisa lepas dari adanya *Centre for Strategic and International Studies (CSIS)* yaitu suatu organisasi yang isinya ilmuwan dan teknokrat serta fungsinya untuk memberi masukan kepada presiden Soeharto sewaktu melaksanakan pemerintahannya. Dari adanya organisasi tersebut, para pengusaha Tionghoa semakin leluasa mengembangkan usahanya, mereka juga banyak merekrut para pejabat kemudian disuap. Sehingga banyak terjadi kecurangan seperti KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) yang berkembang pesat di tubuh para konglomerat Tionghoa.

Terlihat lah secara jelas bagaimana kedepannya, sudah pasti golongan etnis Tionghoa yang memegang peran penting perekonomian Indonesia. Dan ini dianggap menjadi penghambat bagi warga pribumi yang menjadi saingan berat, sehingga tersentil kesenjangan sosial antara pribumi dan etnis Tionghoa karena para pemilik modal seperti etnis Tionghoa merasa terganggu timbul lah konflik bathin yang semakin menjadi. Kemudian pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang bernanma *Cukong* atau *Cukongisme* yaitu istilah Cina (Hokkien) yang artinya majikan. Di Indonesia sendiri istilah tersebut digunakan untuk para

⁶ John Maxwell, Soe Hok Gie, *Pergulatan Intelektual muda melawan Tirani*. Jakarta: Grafiti, 2001, hlm 89-91

usaha yang gigih bekerja keras. Cukong sendiri diadopsi dari system ekonomi benteng Ali Baba pada masa Orde Lama.

Presiden Soeharto disamping menggunakan para teknokrat, juga menggunakan para sahabat, mereka antara lain The Kian Seng alias Mohammad “Bob” Hasan, Yantje Liem. Tujuan Soeharto yakni untuk mendapatkan dana yang banyak untuk kepentingan pribadi semata, dengan cara memberikan fasilitas yang memadai dan juga memberikan hak monopoli cengkeh, terigu, semen dan hak lainnya. Dengan mendirikan berbagai yayasan ini untuk berkepentingan menyalurkan dana, adapun yayasan yang dibangun antara lain Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bakti Sosial, Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti, diantara mereka memang hidup dengan eksklusif tapi kenyataannya tidak semua yang mereka miliki adalah milik etnis Tionghoa, hanya semata-mata saja.⁷

Memanfaatkan segelintir pengusaha etnis Tionghoa yang dijadikan kroni Presiden Soeharto dan tumbuhnya pengusaha perjudian dan maksiat dll, hal ini tekah menimbulkan citra yang sangat negative di hadapan rakyat Indonesia. Ini membuat seolah-olah seluruh etnis Tionghoa sangat rakus, tidak bermoral dan hanya mengeruk kekayaan dengan melakukan hal-hal yang tidak baik dan telah merusak citra Indonesia.

Untuk mengawasi gerak-gerik serta kegiatan etnis Tionghoa, pemerintah membentuk sebuah institusi dalam tubuh Badan Koordinasi Intelijen atau disingkat BAKIN, yaitu Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC). Waktu itu etnis Tionghoa mengalami ketidakberdaya karena badan tersebut. Etnis Tionghoa

⁷ Benny G. Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik*, hlm 1013-1014

hanya dijadikan warga kelas dua yang selalu menjadi kambing hitam dalam setiap masalah di Indonesia.⁸

Kesenjangan antara kaum pribumi dengan golongan etnis Tionghoa semakin terlihat dan kuat. Melalui Kepres No. 14A Tahun 1980 ada sebutan bahwa kaum pribumi adalah golongan lemah dan orang Tionghoa Indonesia golongan kuat. Di bidang ekonomi ini orang Tionghoa Indonesia adalah sebagai pedagang yang kaya. Muncul pula spekulasi orang Tionghoa Indonesia yang menguasai bidang ekonomi dan mendominasi di negeri Indonesia.⁹ Dengan terbentuknya *Sianghwee* dan Sarikat Dagang Islam melambangkan persaingan antara golongan etnis Tionghoa Indonesia dengan orang Indonesia atas dasar perbedaan rasial. Selain itu persaingan ekonomi merupakan ketegangan yang luar biasa antara orang Tionghoa Indonesia dan juga orang Indonesia. Perbedaan kondisi ekonomi ini lah yang menimbulkan konflik serta kesenjangan sosial yang mendalam di tubuh Indonesia.

Selain itu juga muncul diskriminasi ekonomi yang lain, yaitu Assat, atau yang lebih dikenal dengan Gerakan Assat. Beliau adalah seorang politisi yang beralih menjadi pengusaha, dalam usahanya yakni mengorganisir kampanye pada awal tahun 1956 bertujuan untuk mendesak pemerintah memberikan pengutamaan dalam urusan bidang ekonomi kepada orang pribumi dan bukan untuk warga pribumi secara umum. Beliau juga berpandangan bahwa: "...WNI asli harus

⁸ *Ibid*, hlm 1024.

⁹ Leo Suryadinata (ed), *Polityc Thinking of Indonesian Chinese 1900-1995*, Singapore: Singapore University Press, 1997, hlm.23.

mendapatkan perlindungan khusus dalam bidang usaha-usaha mereka dibidang ekonomi daripada persaingan orang-orang asing pada umumnya dan pada golongan etnis Tionghoa pada khususnya.”¹⁰

Dalam perjalanan negeri ini, sejarah mencatat beberapa kali etnis Tionghoa menjadi korban sasaran pembunuhan massal ataupun penjarahan seperti contoh pembantaian Tionghoa pada masa perang Jawa 1825-1930, pembantaian di Batavia 1740, dan telah menewaskan lebih dari 10.000 orang Tionghoa oleh pasukan VOC dan ratusan rumah dijarah dan serta dibakar semauanya mereka. Korban pembunuhan itu memenuhi sungai yang kini dinamakan sungai Angke.¹¹ Selain itu juga ada pembantaian di Jawa tahun 1946-1948, peristiwa rasialis 10 Mei 1963, 5 Agustus 1973, Malari 1974.

Sementara pada tanggal 22 November 1980, terjadi penjarahan, perusakan serta perampokan juga pembakaran rumah, toko dan kendaraan milik etnis Tionghoa yang terjadi di Solo. Kerusuhan tersebut dipicu hanya masalah perkelahian antar siswa dan seorang pemuda Tionghoa. Dari kerusuhan tersebut menjalar ke beberapa tempat lain seperti, Boyolali, Salatiga, Ambarawa, hingga Semarang. Dari kerusuhan diatas ditaksir puluhan milyar rupiah melayang sia-sia dan sangat merugikan negara.¹² Namun dari kesekian banyak keusuhan yang terjadi menjadikan etnis Tionghoa semakin percaya diri untuk hidup di Indonesia

¹⁰ Assat, *The Chinese Grip on Our Economy*” dalam Feith dan Castels, *Indonesian Politycal Thinking*, hlm.346.

¹¹ *Ibid*, hlm. 571.

¹² *Ibid*, hlm. 1028.

khususnya Yogyakarta. Dan puncaknya terjadi kerusuhan pada tragedi Mei 1998 di Jakarta.

Bila di kota-kota lain terjadi konflik, lain halnya di Yogyakarta. Kota Pelajar, Kota Budaya. Itulah yang sering kita dengar. Namun, bagi warga Yogyakarta, hidup damai, rukun, ramah, sopan, dan saling menghormati adalah hal yang wajib mereka lakukan. Begitu pula dengan suku dan ras lain yang hidup di kota ini. Suasana yang ramah dan mendukung membuat etnis non Yogyakarta terbiasa untuk hidup membaur dan merasakan kenyamanan untuk menikmati Yogyakarta. Permasalahan pasti ada, namun semua itu pasti lenyap karena adanya sikap toleransi yang cukup kuat di kota Yogyakarta. Orang Tionghoa di Yogyakarta memperdagangkan semua hal yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari. Toko-toko disepanjang jalan utama di Yogyakarta, sejak yang kecil maupun yang besar sebagian besar merupakan milik orang Tionghoa. Toko-toko itu sebagian juga masih merupakan tempat tinggal mereka.

Untuk orang Tionghoa muslim, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan lainnya. Misalnya, ada golongan kelas menengah ke atas, tapi ada golongan menengah ke bawah. Sebagian dari mereka membuka usaha di rumahnya seperti berjualan barang eceran untuk kebutuhan sehari-hari, toko bangunan, bengkel, dan jual beli onderdil motor. Disamping itu, ada juga yang berprofesi sebagai dokter, contohnya Dr. Yap, beliau merupakan pendiri rumah sakit khusus mata di Jln. Cik Di Tiro Yogyakarta, tenaga pendidik seperti Prof. Tjan Tjoe Siem, beliau pernah mengajar di IAIN Sunan Kalijaga, Andreas Susanto yang mengajar di Universitas Atmajaya, Ahmad Sutanto dan Ibu Margaretha mengajar di Universitas Ahmad

Dahlan.¹³ Namun sedikit sekali dari etnis Tionghoa yang menjadi Pegawai Negeri Sipil, karena pada masa Orde Baru orang Tionghoa dilarang menduduki posisi yang signifikan baik sebagai pegawai biasa, guru, ataupun militer. Hal ini mendorong para etnis Tionghoa baik non muslim maupun yang beragama Islam untuk bekerja di sektor swasta. Seperti menjadi dokter di rumah sakit swasta dan mengajar di Universitas swasta.

Karena dulunya pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan atau larangan bagi orang Tionghoa untuk mempraktikkan hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat pribumi, baik itu tradisi, adat istiadat, maupun agama. Peraturan ini membuat orang-orang Tionghoa yang memeluk Islam secara otomatis mengalami penurunan derajatnya menjadi sama dengan penduduk pribumi. Dari dampak larangan tersebut muncul dikalangan Tionghoa non muslim untuk tidak mengakui anggota keluarga mereka yang memeluk Islam. Bagi mereka saat itu, Islam dianggap identik dengan penduduk pribumi yang miskin, bodoh, dan terbelakang. Kondisi ini membuat semakin merenggangnya hubungan antara masyarakat pribumi dengan golongan Tionghoa, juga membangun pola yang cenderung antagonistik.¹⁴ Dampak lainnya juga bermunculan, seperti lambat laun Tionghoa muslim akan tersingkir dari komunitas Tionghoa. Mereka lebih memilih berasimilasi dengan warga pribumi. Di kemudian hari, identitas

¹³ Hari Suryatmoko, "Prof. DR. Tjan Tjoe Siem" dalam Junus Jahja (editor), *Zaman Harapan Bagi Keturunan Tionghoa*, Jakarta, Yayasan Ukhuwah Islamiyah, 1984, hlm. 11.

¹⁴ Lihat: Tionghoa, Islam, dan Indonesia_...Verba Volant, Scripta Manent.htm. diakses 7 Maret 2013.

Tionghoa mereka pun hilang. Berganti dengan identitas sebagai pribumi. Generasi-generasi sesudahnya pun melabelkan diri sebagai pribumi dengan kesadaran identitas yang berbeda, mereka bukan Tionghoa, tetapi seorang pribumi. Hanya saja, secara fisik mereka memiliki kulit yang putih, mata yang sipit, dan cara bicara yang seperti Tionghoa.

Namun seiring berjalannya waktu, bekas stigma negatif pun masih kadang sering terdengar yang dialamatkan kepada etnis Tionghoa, seperti diskriminasi, ras, dll. Di kalangan Tionghoa sendiri, masih menunjukkan resistensi terhadap Islam. Mereka masih melihat bahwa Islam adalah agama pribumi yang penganutnya adalah miskin, intoleran, pemalas, dan terbelakang.

Kebanyakan dari mereka juga masih mengusir anggota keluarganya yang masuk Islam¹⁵ di kalangan pribumi pun sepertinya demikian, mereka kadang masih mendiskriminasi terhadap Tionghoa yang non muslim. Bagi Tionghoa yang bergama Islam pun tidak luput dari diskriminasi yang dilakukan oleh pribumi. Padahal, integrasi Tionghoa muslim dan non muslim dengan masyarakat pribumi menjadi faktor penting perkembangan kota-kota di Jawa dan tumbuhnya pusat-pusat aktivitas ekonomi. Di kota-kota pelabuhan, muslim Tionghoa memainkan peranan penting menjadi syahbandar, pengoleksi cukai pelabuhan, dan pengatur lalu lintas kapal atas nama penguasa. Beberapa diantara mereka juga memperoleh gelar kebangsawanan dan menikahi wanita elite lokal.

¹⁵ *Ibid.*

B. Kondisi Politik

Pada masa revolusi tahun 1945-an, Mayor John Lie yang menyelundupkan barang-barang ke Singapura untuk kepentingan pembiayaan Republik. Rumah Djiaw Kie Siong di Rengasdengklok, dekat Karawang, diambil-alih oleh Tentara Pembela Tanah Air (PETA), kemudian penghuninya dipindahkan agar Bung Karno dan Bung Hatta dapat beristirahat setelah "disingkirkan" dari Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945. Di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang merumuskan UUD 1945 terdapat 4 orang Tionghoa yaitu Liem Koen Hian, Tan Eng Hoa, Oey Tiang Tjoe, Oey Tjong Hauw, dan di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) terdapat 1 orang Tionghoa yaitu Drs.Yap Tjwan Bing. Liem Koen Hian yang meninggal dalam status sebagai warganegara asing, sesungguhnya ikut merancang UUD 1945. Lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman, pun pertama kali dipublikasikan oleh Koran Sin Po.¹⁶ Dalam perjuangan fisik ada beberapa pejuang dari kalangan Tionghoa, namun nama mereka tidak banyak dicatat dan diberitakan. Salah seorang yang dikenali ialah Tony Wen, yaitu orang yang terlibat dalam penurunan bendera Belanda di Hotel Oranye Surabaya.

Pada masa Demokrasi Parleментар (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin peran Baperki sangat penting, yakni memperjuangkan hak-hak dan kepentingan etnis Tionghoa dan melawan setiap bentuk diskriminasi. Baperki juga mendirikan sekolah-sekolah maupun universitas untuk menampung anak-anak Tionghoa yang

¹⁶ Lihat:dr-kwa-tjoan-sioe-1893-1948-pendiri-rs-husada/#.UTigyOwuPTw dalam blog.budaya Tionghoa diakses 6 Maret 2013.

membutuhkan pendidikan yang lebih matang. Baperki berdiri tahun 1954 merupakan organisasi ormas terbesar yang mewakili etnis Tionghoa dalam memperjuangkan hak-haknya. Baperki juga mendirikan sekolah-sekolah dan universitas untuk membantu anak-anak Tionghoa yang membutuhkan pendidikan.

Baperki dalam menyelesaikan masalah etnis Tionghoa di bawah pimpinan seperti Siauw Giok Tjhan, Go Gien Tjwan, Oei Tjoe Tat. Mereka mengembangkan sebuah doktrin *nation building* isinya adalah doktrin yang membangun sebuah bangsa yang bersih dari diskriminasi rasial serta kesamaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia.¹⁷ Dalam semboyan bangsa Indonesia Bhineka Tunggal Ika bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, etnis, dan ras serta agama dengan budaya nya yang masing-masing berbeda pula. Dalam kenyataannya Baperki harus tarik-menarik dengan politik kiri dan kanan karena memang sudah tidak punya pilihan lain. Dari situ lah Baperki berdiri di belakang Presiden Soekarno dan mendukung kekuatan politik Soekarno yang otomatis dalam satu garis politik pada waktu itu, seperti PNI,¹⁸ PKI,¹⁹ dan Partai Indonesia.

Baperki sendiri adalah pengertian dari Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia, yang biasa disingkat menjadi Baperki adalah sebuah organisasi massa yang didirikan pada suatu pertemuan di Gedung Sin Ming Hui di

¹⁷ Asvi Warman Adam, *Cina Absen dalam pelajaran Sejarah*, Koran Tempo, 12 Februari 2002

¹⁸ Lahirnya PNI dilatarbelakangi oleh situasi sosial politik yang kompleks. Lihat: <http://sejarah-bobby.blogspot.com/2010/05/partai-nasional-indonesia-pni.html>. diakses pada 6 Maret 2013

¹⁹ Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai politik di Indonesia yang berideologi komunis. Lihat: <http://politik.kompasiana.com>. Diakses pada 6 Maret 2013.

Jakarta pada 13 Maret 1954. Pertemuan ini dihadiri oleh 44 orang peserta, kebanyakan dari mereka merupakan wakil dari berbagai organisasi Tionghoa, seperti PERWITT (Persatuan Warga Indonesia Turunan Tionghoa) yang terbentuk di Kediri, PERWANIT (Persatuan Warga Indonesia Tionghoa) yang berdiri di Surabaya dan PERTIP (Perserikatan Tionghoa Peranakan) yang berdiri di Makassar. Semua peserta adalah peranakan Tionghoa yang umumnya berpendidikan Belanda. Sebagian besar dari mereka berasal dari Jawa, tetapi ada pula sebagian yang berasal dari luar Jawa, seperti Padang, Palembang, dan Banjarmasin.

Mereka mewakili semua spektrum politik di Indonesia saat itu, antara lain tokoh-tokoh golongan kanan, seperti Khoe Woen Sioe, Tan Po Goan, Auw Jong Peng Koen, Tan Siang Lian, tokoh-tokoh golongan kiri, seperti Siauw Giok Tjhan, Go Gien Tjwan dan Ang Jang Goan, dan mereka yang bergaris netral, seperti Thio Thiam Tjong, Oei Tjoe Tat, Yap Thiam Hien, Tan Eng Tie, Lim Tjong Hian dan Liem Koen Seng. Ketua Baperki yang terpilih saat rapat pembentukannya adalah Siauw Giok Tjhan, seorang wartawan dan aktivis politik pada masa itu, sementara wakil ketuanya adalah Oei Tjoe Tat, Khoe Woen Sioe, The Pek Siong, dan Thio Thiam Tjong.²⁰

Dari era Orde Lama tersebut dan terutama pada masa Republik Indonesia Serikat terkuak adanya skandal yang berbau kebijakan rasis. Kebijakan itu antara lain adanya program benteng importer yang diadakan oleh Ir. Djuanda yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kesejahteraan. Kebijakan yang beliau

²⁰Lihat: web.budaya-tionghoa.net/ Diakses 6 Maret 2013.

tanamkan yakni memberikan lisensi impor kepada golongan pribumi untuk melahirkan pengusaha-pengusaha yang kurang baik, maksudnya pengusaha yang tidak punya modal maupun kadang tidak mempunyai kantor, dan membawa keluar masuk sebuah aktentas dalam kantor pemerintah dengan tujuan untuk mendapatkan lisensi impor dari berbagai macam barang. Setelah mendapatkan lisensi tersebut mereka mendatangi para pedagang-pedagang Tionghoa dengan maksud menjualnya dan sistem tersebut dinamakan sistem Ali Baba.²¹

Dalam kabinet Ali Sastroamidjodjo yang pertama terdapat pula etnis Tionghoa. Mereka berdua berkedudukan sebagai menteri, namun hal ini tidak lah menjamin kesejahteraan etnis Tionghoa, karena pemerintah melarang adanya perdardagangan dan peredaran beras. Alasannya pemerintah yang akan menguasai perdagangan tersebut, sedangkan pada kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua, muncul juga gerakan yang di beri nama Gerakan Assat, gerakan ini bertujuan untuk perbedaan perlakuan dan pemberian fasilitas kepada pengusaha-pengusaha Tionghoa. Beliau pada saat itu menjabat menjadi anggota parlemen dan mendesak pemerintah untuk mengeluarkan peraturan yang bertujuan untuk menghentikan keterlibatan etnis Tionghoa, yakni warga pribumi maupun warga asing yang bergerak dibidang usaha dan dianggap menguntungkan. Maksudnya beliau hanya untuk menentang dan menjalankan program-program anti Tionghoa. Karena menurut beliau, etnis Tionghoa tidak boleh dibiarkan menguasai pasar ekonomi Indonesia.

²¹ Pramoedya Ananta Toer, dkk, *Kronik Revolusi Indonesia*. Jilid 1, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999, hlm.10.

Masih di Orde Lama, terdapat ada beberapa menteri Republik Indonesia dari keturunan Tionghoa seperti Oei Tjoe Tat, Ong Eng Die, Siauw Giok Tjhan, dll. Bahkan Oei Tjoe Tat pernah diangkat sebagai salah satu Tangan Kanan Ir. Soekarno pada masa Kabinet Dwikora.²² Pada masa ini hubungan Ir. Soekarno dengan beberapa tokoh dari kalangan Tionghoa dapat dikatakan sangat baik. Walau pada Orde Lama terdapat beberapa kebijakan politik yang diskriminatif seperti Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959 yang melarang WNA Tionghoa untuk berdagang eceran di daerah di luar ibukota provinsi dan kabupaten. Hal ini menimbulkan dampak yang luas terhadap distribusi barang dan pada akhirnya menjadi salah satu sebab keterpurukan ekonomi menjelang tahun 1965 dan lainnya.

Selama Orde Baru berkuasa, praktis rakyat Tionghoa menjadi yang terpinggirkan dan mengalami diskriminasi. Dari hak itu dapat dibuktikan dengan adanya beberapa peraturan yang mengatur eksistensi Tionghoa di Indonesia. Pertama tentang Keputusan Presiden Kabinet No.127/U/KEP/12/1996 tentang masalah ganti nama. Kedua instruksi Presidium Kabinet No.37/U/IV/6/1967 tentang kebijakan pokok masalah Cina yang wujudnya dibentuk dalam Badan Koordinasi masalah Cina, yaitu sebuah unit khusus di lingkungan Bakin. Ketiga surat edaran Presidium Kabinet RI No.SE-06/PresKab/6/1967, tentang kebijakan pokok WNI keturunan asing melalui proses asimilasi. Keempat, instruksi

²² Dwikora adalah akronim dari Dwi Komando Rakyat. Lihat: <http://politik.kompasiana.com/2010/12/30/>, diakses pada 10 Oktober 2012.

presidium kabinet No.37/U/IN/6/1967, tentang tempat-tempat yang disediakan untuk anak-anak WNA Cina di sekolah-sekolah nasional sebanyak 40%.²³

Di masa Orde Baru muncul juga Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atau yang di singkat SBKRI atau yang sering diplesetkan menjadi “Surat Bukti Kebodohan Republik Ini” yang tujuan utamanya untuk warga etnis Tionghoa beserta keturunannya. SBKRI ini menempatkan WNI Tionghoa pada posisi status hokum WNI yang “masih dipertanyakan”.

Di Yogyakarta sendiri, sebelum terjadiya reformasi, belum terdengar geliat para etnis Tionghoa non-muslim maupun yang muslim terjun langsung ke dunia politik, ini dikarenakan adanya beberapa aturan-aturan yang melarangnya. Pada masa pemerintah kolonial Belanda ada aturan yaitu *passenstelsel*, merupakan kewajiban bagi setiap orang Tionghoa baik muslim maupun non muslim yang hendak bepergian untuk mempunyai surat jalan dari karisidenan setempat.

Selain itu ada juga *wijkenstelsel*, yang merupakan aturan yang berisi perintah untuk menempatkan orang-orang Tionghoa pada satu area khusus atau sering disebut Pecinan. Kebanyakan lokasi mereka tersebar di antara kampung – kampung yang ada di kota Yogyakarta, mulai dari Krapyak, Wirobrajan, Samirono hingga Jetis. Hal yang mencolok adalah perbedaan berdasarkan klas ekonomi, yang kaya mampu membangun rumah yang terpisah dari tempat usahanya, sedangkan yang belum kaya menjadikan rumah sekaligus tempat usaha (rumah toko/ruko). Tak jarang bagi mereka yang masih mengontrak rumah,

²³Lihat:<http://pantangpulangsebelumpadam.blogspot.com/2007/12/perilaku-ekonomi-etnis-cina-di.html>, diakses pada 9 Juli 2012.

berpindah – pindah tempat sampai beberapa kali jika tak bisa memperpanjang sewanya atau hendak dipakai sendiri oleh pemiliknya.²⁴

Pemerintah Belanda dalam melakukan peraturan nya di Yogyakarta pun agak berbeda. Meskipun berbagai peraturan atau kebijakan telah memperlemah kekuasaan politik Sultan, tetapi Sultan mempunyai otoritas yang tinggi terhadap rakyatnya. Karena di Yogyakarta ini Belanda tidak mempertahankan kekuasaannya secara langsung, tetapi dengan menggunakan kontrak-kontrak politik dan mencegah campur tangan langsung terhadap urusan intern Sultan.²⁵

Pada masa kolonial ini pun muncul Geger Pationghoan, yakni pemberontakkan orang-orang Tionghoa terhadap Belanda. Tepatnya terjadi pada tahun 1742 di Semarang. Yogyakarta pun tak luput terkena imbasnya, itu merupakan salah satu bukti konflik besar yang menimpa mereka. Namun tampaknya mereka kuat dan sadar betul berani mengambil resiko apapun untuk tetap eksis walaupun hanya diberi jalan dibidang ekonomi serta perdagangan yang tempatnya terbatas karena adanya peraturan seperti PP No. 10/1959.²⁶

Untuk kalangan Tionghoa muslim, interaksi dengan strukur kekuasaan politik dengan masyarakat bawah terbangun lebih mudah dan terjaga. Alasannya karena persamaan agama. Ada juga sebagian muslim Tionghoa yang enggan

²⁴ Leo Suryadinata, "*Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia*", Jakarta, Gramedia, 1988, hlm. 94-99

²⁵ Soedarisman Poerwokoesomo, "*Kasultanan Yogyakarta*", Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1985, hlm. 10.

²⁶ Pramodya Anantatoer, "*Hoakiau di Indonesia*", Jakarta, Garba Budaya, 1999, hlm. 132.

disebut sebagai keturunan dan mereka benar-benar menyatu dengan masyarakat setempat. Namun ada sebagian muslim Tionghoa yang berafiliasi ke organisasi keislaman yang kental warna Tionghoa nya, yaitu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI). Hal lain yang menyebabkan begitu pentingnya peran PITI bagi Tionghoa muslim yaitu pada saat terjadi perubahan politik yakni runtuhnya Orde Baru dan munculnya era reformasi. Perubahan politik ini mendorong terjadinya perubahan sikap orang-orang Tionghoa ke arah yang terbuka kepada orang-orang pribumi, yang kemudian mereka terdorong masuk Islam, karena mayoritas golongan pribumi itu muslim.²⁷ Meskipun banyak yang menyimpulkan bila masuk Islam itu akan menjadi miskin dan turun derajat, dan hal ini yang perlu dijelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dalam Islam dijelaskan bahwa Islam tidak menghendaki penganutnya miskin dan bodoh. Islam malah mengharuskan pemeluknya untuk mencari harta yang sebanyak-banyaknya asal caranya halal dan mewajibkan penganutnya untuk menuntut ilmu pengetahuan setinggi-tingginya di bidang apa saja yang bermanfaat bagi masyarakat dan menuntut ilmu pengetahuan boleh dimana saja²⁸

Di masa Orde Baru ini banyak orang Tionghoa yang bersifat eksklusif, sehingga menimbulkan kurangnya dorongan untuk masuk Islam. Kecuali hatinya mendapat hidayah dari Allah SWT atau menikah dengan pribumi yang beragama Islam. Namun dengan runtuhnya Orde Baru maka orang-orang Tionghoa tidak lagi berlindung dibalik kekuasaan. Sehingga orang-orang Tionghoa harus lebih

²⁷ Lihat: Muslim Tionghoa di Indonesia II.htm. Diakses 6 Maret 2013.

²⁸ *Ibid*

banyak berinteraksi dan bekerjasama dengan golongan pribumi. Interaksi dan kerjasama yang semakin luas bisa menjadi salah satu dorongan kuat bagi orang-orang Tionghoa untuk masuk Islam. Karena itu setelah runtuhnya Orde Baru dan munculnya era reformasi bisa di logika akan banyak orang-orang Tionghoa yang masuk Islam. Untuk mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi selanjutnya, maka PITI lebih tegas menyebut mereka sebagai organisasi dakwah Islam Tionghoa.²⁹

C. Kondisi Sosial

Pemerintah Kolonial Belanda telah mewariskan kepada kita masalah etnis Tionghoa yang dapat kita perumpamakan seperti penyakit kanker yang dalam tubuh bangsa Indonesia dan sampai sekarang merintanginya terwujudnya cita-cita tentang kebangsaan. Secara sadar maupun tidak kita telah menggunakan kriteria ras Hindia Belanda untuk membagi golongan semua etnis Tionghoa, baik perantau generasi pertama dan anak-anak mereka yang lahir di bumi Hindia Belanda maupun anak-anak hasil dari perkawinan dengan anak pribumi. Dan etnis Tionghoa yang merupakan sebagai orang Timur Asing yang ditempatkan di atas anak-anak pribumi dan hal ini berlaku begitu lama.

Kebijakanaksanaan Kabinet Ampera yang dengan tegas dan konsekuen menggantikan kriterium ras dengan kriterium kewarganegaraan dan hanya mengenal dua macam warga negara, yaitu warga negara asing dan warga sendiri tanpa mempersoalkan keturunan mereka. Di sadari atau tidak hal ini tidak dapat segera dan sempurna dalam mewujudkan cita-cita bangsa kita tentang kebangsaan

²⁹ <http://www.muhammadiyah-tabligh.or.id/> diakses pada 6 Maret 2013.

dengan dikeluarkan peraturan dan Undang-Undang yang bersangkutan. Tampaknya permasalahan laten anti Tionghoa ini adalah akibat interaksi kolonialisme dan gejala yang dikenal sebagai *Chinese culturalism*. Setidaknya ada beberapa hal yakni kolonialisme, Chinese Culturalism, interaksi.

Seperti diketahui secara umum, kolonialisme bertujuan untuk menempatkan golongan Tionghoa di atas dan memberikan perlakuan yang berlainan kepada mereka dibandingkan dengan pribumi sehingga selain menimbulkan kesenjangan social juga menimbulkan neerkijken *op de Inlander*, dari situ lah pihak pribumi merasakan curiga serta rasa benci terhadap golongan etnis Tionghoa. Selain itu juga menutup bidang-bidang tertentu, seperti bidang pemerintahan dan bidang militer, bidang tersebut hanya terbuka untuk golongan Belanda yang berkuasa dan sejumlah anak pribumi yang bangsawan yang terpilih. Orang Tionghoa tidak boleh membeli tanah, dan sedikit gerakan mereka terbatas.³⁰

Pemerintah kolonial Hindia Belanda memperkuat perasaan Chinese Culturalism di kalangan mereka dengan maksud adanya tali ikatan dengan kebudayaan Tiongkok yang mempunyai tradisi gilang gemilang selama lebih 300 tahun. Dengan demikian dalam usaha menentang dominasi bangsa kulit putih, dalam hal ini adalah penjajah Belanda, yang memperlakukan semua bangsa yang berwarna sebagai bangsa inferior secara otomatis orang Tionghoa jatuh kembali kepada kebudayaan Tiongkok. Kebudayaan yang pada permulaan abad ke-20

³⁰ Leo Suryadinata, *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia*, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, 2005, hlm. 319.

melalui Jepang memperlihatkan vitalitasnya untuk mengadakan modernisasi dan kemampuannya untuk mengalahkan sebuah *big white western power*, Rusia.³¹

Seperti yang telah diuraikan diatas, sebagai akibat dari interaksi kolonialisme dan Chinese culturalism, harus diakui bahwa banyak diantara orang Tionghoa yang setelah 1945 menjadi Warga Negara Indonesia dapat digambarkan seperti orang penderita sakit jiwa, dalam arti mereka tidak mempunyai orientasi tegas terhadap identifikasi penuh dengan Indonesia.³² Disadari atau tidak orang Tionghoa sering memperlihatkan *superiority complex* terhadap anak pribumi, tidak dapat disangkal pula bahwa tidak sedikit kalangan anak pribumi yang mempunyai *inferiority complex* terhadap orang Tionghoa setelah orang Belanda angkat kaki dari Indonesia.

Stratifikasi sosial dalam masyarakat Tionghoa Indonesia ada perbedaan antara lapisan buruh dengan lapisan majikan, yaitu golongan orang miskin dengan golongan orang kaya. Namun hal tersebut tidak mereka sadari karena golongan buruh tidak menyadari akan kedudukannya. Hal ini disebabkan masih adanya keterikatan kekeluargaan antara si buruh dengan si majikan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan orang Tionghoa biasanya memang dikerjakan oleh sekelompok kekerabatan kadang-kadang sebuah perusahaan dikerjakan oleh

³¹ *Ibid*, hlm. 320.

³² Banyak diantara kaum intelegentsia karena pendidikannya berorientasi kepada Barat/Nederland, sedangkan yang nasionalis sering berorientasi kepada negara leluhurnya yang telah memberikan perlawanan heroik terhadap imperialisme Jepang.

sekelompok yang sama dari Negara asal mereka yaitu China yakni dulu sebelum datang ke Indonesia.

Bagi masyarakat Tionghoa Indonesia di suatu daerah, pemerintah Belanda dulu mengangkat seorang pemimpin. Tugas utama pemimpin yakni menjaga ketertiban, keamanan, dari masyarakat Tionghoa yang terdapat disuatu daerah atau kota yakni untuk menurus suatu hal, misalnya dalam hal perkawinan, perceraian serta adat istiadat setempat. Mereka juga berfungsi sebagai penasehat pemerintah Belanda jika diperlukan terutama dalam hal penarikan pajak. Dan pemimpin yang diangkat pemerintah Belanda tersebut biasanya berpangkat, mayor atau kapiten.

Di masa pemerintah Jepang menerapkan kebijakan Undang-Undang No. 7 tanggal 11 April 1942, dimana Jepang menggolongkan orang Cina sebagai bangsa asing, sehingga wajib mendaftarkan diri dan memenuhi kewajiban yang dibebankan pada bangsa asing, salah satunya membayar pajak. Besarnya pajak yang harus dibayar adalah untuk perempuan 50 gulden.³³ Karena jumlah tersebut termasuk besar, maka pembayaran dapat dilakukan dengan cara mengangsur bagi golongan Cina yang tidak mampu. Peraturan *passentensel* pada zaman Belanda diberlakukan kembali oleh pendudukan Jepang. Jika akan melakukan perjalanan maka mereka harus membawa surat *pass* jalan dan surat pendaftaran bangsa asing. Untuk memperoleh kedua surat ini pun mereka dibebani sejumlah biaya. Peraturan ini diwajibkan bagi orang Cina yang telah dewasa.

³³ Gulden merupakan satuan mata uang dasar di Hindia Belanda. Lihat M.R. Fernando & David Bulbeck, *Chinese Economic Activity in netherlands India*, Canbera: Australian National University, 1992, hlm. 102

Banyaknya masalah yang timbul di bidang sosial minoritas etnis Tionghoa, pemerintah juga berfikir keras bagaimana caranya agar permasalahan Tionghoa selesai dengan dewasa, asimilasi merupakan jalan keluar bagi masalah Tionghoa Indonesia. Awalnya gerakan asimilasi Tionghoa Indonesia muncul pada tahun 1959. Hal tersebut muncul bersamaan dengan adanya peraturan larangan Warga Negara Asing Tionghoa berdagang eceran di daerah di luar ibu kota provinsi maupun kabupaten. Dan hal ini menimbulkan dampak yang luas terhadap distribusi barang. Peraturan tersebut yaitu PP No.10 tahun 1959. Terjadinya kekacauan tersebut semakin membuat golongan etnis Tionghoa yang setuju dengan gerakan asimilasi tersebut. Mereka berpendapat bahwa satu-satunya jalan keluar dari masalah tersebut yaitu dengan adanya pembaruan antara orang Tionghoa Indonesia dengan pribumi.³⁴

Gerakan asimilasi tersebut di kalangan etnis Tionghoa dilakukan mulai 21 Maret 1960. Ketika itu sepuluh orang Tionghoa Indonesia menandatangani piagam asimilasi sebagai jalan keluar masalah Tionghoa Indonesia.³⁵ Sepuluh orang tersebut antara lain Onghokham, Auwyang Peng Koen, Injoo Beng Goet, Lauw Chuan Tho (Junus Yahya), Kwee Hwat Djieen, Tjung Tin Jan, Tjia Djie Siong, Tan Bian Seng, dan Tantekhian. Mereka semua juga berpendapat bahwa masalah Tionghoa Indonesia hanya dapat diselesaikan dengan jalan asimilasi.

³⁴ Charles Coppel, *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm.26.

³⁵ Mereka berpendapat bahwa jalan keluar satu-satunya dari masalah Tionghoa Indonesia yaitu dengan asimilasi atau pembaruan langsung dengan golongan pribumi. Lihat di Junus Yahya, dalam *Masalah Tionghoa Indonesia – Asimilasi vs Integrasi*, hlm.26-27.

Misalnya dengan cara kawin campur antara orang Tionghoa Indonesia dengan pribumi.³⁶ Proses asimilasi ini bertujuan untuk menginginkan pembaruan orang Tionghoa Indonesia ke dalam tubuh bangsa Indonesia tanpa adanya perbedaan yang eksklusif. Mereka juga berpendapat, sebaiknya golongan etnis Tionghoa Indonesia sebagai individu menyatukan dengan suku setempat dalam segala hal. Tujuan tersebut yaitu agar sifat eksklusif di kalangan Tionghoa Indonesia yang telah ada sejak lama dapat berangsur-angsur hilang.³⁷

Asimilasi sendiri artinya adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Untuk mengurangi perbedaan itu, asimilasi meliputi usaha-usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Hasil dari proses asimilasi yaitu semakin tipisnya batas perbedaan antarindividu dalam suatu kelompok, atau bisa juga batas-batas antar kelompok. Selanjutnya, individu melakukan identifikasi diri dengan kepentingan bersama. Artinya, menyesuaikan kemauannya dengan kemauan kelompok. Demikian pula antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.

³⁶ Arief Budiman, *Siauw Giok Tjhan yang Tidak saya kenal dalam Siauw Tiong Djin*, Sumbangsih Siauw Giok Tjhan dan Baperki, Jakarta: Hasta Mitra, 2000, hlm.28.

³⁷ Junus Jahja, *Masalah Tionghoa di Indonesia, Asimilasi vs Integrasi*, Jakarta: Tunas Bangsa, 1999, hlm.19.

Untuk itu keberhasilan proses asimilasi dan integrasi suatu etnis sangat mendukung tercapainya keutuhan dan kesatuan bangsa. Etnis minoritas seperti Etnis Cina juga memiliki peranan dalam pencapaian keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia walaupun jumlah mereka termasuk minoritas diantara kemajemukan suku bangsa di Indonesia.³⁸ Proses peleburan dalam sebuah asimilasi harus diarahkan sampai pada suatu kondisi di mana istilah “minoritas Tionghoa” menjadi tak ada. Untuk mencapai kondisi demikian, perlu asimilasi yang komprehensif sekaligus butuh campur tangan pemerintah. Melalui asimilasi, eksklusivitas jadi hilang sehingga terbentuk perasaan saling memiliki. Hal tersebut dapat memperkuat keutuhan dan kesatuan bangsa. Untuk mempercepat pembauran etnis di Indonesia, maka persamaan pandangan, saling belajar, dan saling menghormati antar kelompok etnis sangat diperlukan.

Menurut Leo Suryadinata dalam *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa* menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah telah cukup sukses dalam pengertian bahwa lebih banyak Tionghoa totok menjadi peranakan dan lebih banyak Tionghoa peranakan menjadi lebih Indonesia. namun, sebagian kelompok etnis Tionghoa tetap dapat dikenali. Dalam bentuk kebudayaan, orang Tionghoa telah menjadi lebih Indonesia. tetapi penggolongan antar kelompok tetap jelas.³⁹

Selama Orde Baru berjaya dalam 3 dekade lebih, selama itu pula etnis Cina banyak mengalami diskriminasi. Hal itu terlihat dari adanya beberapa

³⁸ Blog Annisa Avianti, Proses Asimilasi dan Integrasi Etnis Cina di Indonesia Terhadap Keutuhan dan Kesatuan Bangsa, diakses pada 10 Oktober 2012.

³⁹ Leo Suryadinata, *op cit*, hlm. 187.

peraturan dan kebijakan yang mengatur eksistensi etnis Cina di Indonesia, diantaranya :

1. Keputusan Presiden Kabinet No. 127/U/KEP/12/1996 tentang masalah ganti nama.
2. Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IV/6/1967 tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian Masalah Cina yang wujudnya dibentuk dalam Badan Koordinasi Masalah Cina, yaitu sebuah unit khusus di lingkungan Bakin.
3. Surat Edaran Presidium Kabinet RI No. SE-06/PresKab/6/1967, tentang kebijakan pokok WNI keturunan asing yang mencakup pembinaan WNI keturunan asing melalui proses asimilasi terutama untuk mencegah terjadinya kehidupan eksklusif rasial, serta adanya anjuran supaya WNI keturunan asing yang masih menggunakan nama Cina diganti dengan nama Indonesia.
4. Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967 tentang tempat-tempat yang disediakan untuk anak-anak WNA Cina disekolah-sekolah nasional sebanyak 40% dan setiap kelas jumlah murid WNI harus lebih banyak daripada murid-murid WNA Cina.
5. Instruksi Menteri Dalam Negara No. 455.2-360/1968 tentang penataan Kelenteng-kelenteng di Indonesia.
6. Surat Edaran Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika No. 02/SE/Ditjen/PP6/K/1988 tentang larangan penerbitan dan pencetakan tulisan/ iklan beraksen dan berbahasa Cina.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat semasa Orde Baru tersebut sebenarnya bertujuan untuk pembauran total. Etnis Tionghoa diharapkan dilebur ke dalam budaya pribumi sehingga tercapai asimilasi seperti yang diharapkan. Namun pengistilahan “Tionghoa” sendiri terhadap etnis ini membuat proses asimilasi tersebut sulit dicapai apalagi didukung dengan stereotip tentang etnis “Tionghoa” tersebut.

Selain itu, strategi yang paling komprehensif untuk mengubah identitas etnis Tionghoa adalah dengan melalui pergantian nama. Di tahun 1961 ketika Soekarno masih memerintah, peraturan mengubah nama dikeluarkan bagi orang yang ingin mengganti nama Cina mereka menjadi nama yang Indonesia. Di tahun 1966 setelah Soeharto berkuasa, peraturan ganti nama diberlakukan kembali. Namun prosedur tersebut telah diubah dan disederhanakan dan banyak etnis Tionghoa dianjurkan mengganti namanya. Namun tidak semua Tionghoa Indonesia mengubah nama terutama mereka yang terkenal dengan nama Cina mereka. Ada pula yang menggunakan dua nama, nama resmi dan nama tidak resmi. Nampaknya generasi muda Tionghoa Indonesia, terutama mereka yang lahir setelah kurun tahun 1965 kemungkinan besar telah menggunakan nama yang terdengar nama Indonesia. Namun perlu dicatat, bahwa etnis Tionghoa asing (mereka yang bukan WNI) tidak diperbolehkan mengubah nama Cina mereka dengan nama Indonesia.⁴⁰

Disamping dengan cara melakukan asimilasi ataupun ganti nama yang telah di jelaskan seperti diatas, ada pula yang beranggapan dengan memeluk

⁴⁰ Leo Suryadinata, *op cit*, hlm. 179.

agama Islam yang notabene agama mayoritas Indonesia adalah cara yang efisien. Di lihat dari periode sekitar tahun 70an hingga pertengahan 80an cukup banyak Tionghoa yang memeluk agama Islam. Termasuk para tokoh cendekiawan serta pengusaha-pengusaha Tionghoa Indonesia, seperti Junus Jahja, Moh.Budyana, Jusuf Hamka, dan lain-lain. Gerakan asimilasi memeluk agama Islam ini dimulai sekitar 1979, pencetusnya adalah Junus Jahja. Beliau masuk Islam pada tahun yang sama dan merupakan salah satu pendiri BAKOM PKB. Karena menurut beliau, orang Tionghoa harus bisa menyesuaikan pemukimannya yang baru serta harus mengadopsi agama yang dominan.⁴¹ Menurutny asimilasi adalah gerakan peleburan total melalui berbagai cara, salah satunya dengan cara agama, dalam hal ini adalah agama Islam yang merupakan agama mayoritas di Indonesia.

Disamping itu pula, Junus Jahja sangat giat untuk menganjurkan untuk memeluk agama Islam di kalangan Tionghoa Indonesia, ini merupakan cara yang cukup efisien didalam gerakan asimilasinya. Di tengah-tengah pemukiman Tionghoa Indonesia juga berdiri Yayasan Haji Karim Oey dimana para penduduknya mayoritas bukan agama Islam. Itu merupakan usaha Junus Jahja beserta kawannya di kalangan Tionghoa non muslim untuk memeluk agama Islam. Seperti yang tercantum di bukunya Leo Suryadinata, yayasan tersebut ingin menargetkan 50.000 ribu orang Tionghoa dalam kurun waktu 10 tahun untuk memeluk agama Islam.⁴²

⁴¹ H Junus Yahya, *Islam di mata WNI*, Jakarta: Yayasan Haji Karim Oey, 1993, hlm.iii.

⁴² Leo Suryadinata, *Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1998, hlm 98.

Di Yogyakarta sendiri dalam kurun waktu tahun 1970an. Ditengarai adanya perubahan yang positif. Nampaknya jumlah Tionghoa muslim semakin bertambah, begitu juga di kota besar lainnya. Hal ini seiring berjalannya kebijakan pemerintah mengenai asimilasi warga Tionghoa yang salah satunya dengan berpindah agama, seperti yang telah dijelaskan diatas. Menurut H. Yap A Siong dalam tahun 1970an diperkirakan ada 150.000 orang Tionghoa masuk Islam. Namun perkiraan ini dianggap kurang benar oleh H. Junus Yahya. Beliau memperkirakan hanya 0,5% dari seluruh penduduk Tionghoa di Indonesia yang pada waktu itu sekitar 2,5 juta orang atau sebesar 12.500 orang.⁴³ Sedangkan menurut H. Budi Setyagraha, diperkirakan terdapat 200 lebih orang muslim Tionghoa di Yogyakarta yang berafiliasi pada organisasi PITI Yogyakarta.⁴⁴

Sewaktu lahir pada 14 April 1961 di Jakarta, PITI adalah singkatan dari Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, tetapi kemudian diubah menjadi Persatuan Iman Tauhid Indonesia. Karena keluar instruksi dari pemerintah (14 Desember 1972) yang menekankan agar organisasi ini tidak berciri etnis tertentu, walaupun PITI tetap merupakan wadah berhimpunnya orang-orang Tionghoa muslim. Karena hal itulah muncul berbagai perdebatan mengenai kepanjangan PITI tersebut. Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka para pengikut PITI setuju untuk menggunakan dua kepanjangan yaitu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia

⁴³ Junus Jahja, "3 Tahun Dakwah di Kalangan Keturunan Tionghoa" dalam Junus Jahja, (ed), *Zaman Harapan Bagi Keturunan Tionghoa*, Jakarta, YUI, 1984, hlm. 304.

⁴⁴ Budi Setyagraha, "*Berislam Sebagai Wujud Syukur*", Republika 22 Maret 2005, hlm. 19.

dan Persatuan Iman Tauhid Indonesia. Yang sebagaimana mestinya untuk mewadahi garis keturunan bagi Tionghoa muslim.⁴⁵ Pada masa Orde Baru ini, kebijakan pemerintah dalam menggalakkan gerakan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, maka pada masa itu simbol-simbol, identitas atau ciri seperti bahasa, budaya yang dianggap menghambat pembauran khususnya Tionghoa dilarang dan dibatasi. Adanya kebijakan masa Orde Baru ini ada campur tangan pemerintah yang membuat organisasi PITI ini tidak dapat berkembang. PITI yang mempunyai ciri khas Tionghoa sekaligus Islam tidak boleh ditonjolkan dan tidak boleh menampakkna dirinya ke permukaan dengan alasan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kebijakan pemerintah mengenai SARA ini membuat masyarakat Indoensia menerima SARA dengan dibayangi rasa ketakutan dan kecurigaan bahkan bersikap negative.⁴⁶ Dan akhirnya pada tanggal 15 Desember 1972 PITI mengubah namanya menjadi Pembina Iman Tauhid Islam.

PITI yang pertama didirikan oleh H. Abdul Karim Oey Tjeng Hien, H. Abdusomad Yap A. Siong, Kho Goan Tjin, dan kawan-kawan, bertujuan untuk membantu orang-orang Tionghoa yang ingin masuk Islam, mempelajari Islam, dan mengamalkan Islam melalui kegiatan sosial, selain itu juga untuk wadah organisasi dakwah Islam. Mengenai jumlah Tionghoa muslim di Indonesia, belum ada data yang valid untuk mengukurnya. tetapi pimpinan PITI memperkirakan jumlah penduduk Tionghoa ada 10 juta orang, sedang seorang ahli Cina dari

⁴⁵ Lihat: Muslim Tionghoa di Indonesia II.htm. diakses pada 6 Maret 2012.

⁴⁶ Lihat: Genggam Dunia Interaksi Sosial Muslim Tionghoa-non Muslim Tionghoa dan Pribumi di Yogyakarta.htm diakses 6 Maret 2013.

Universitas Indonesia, A. Dahana mencatat 7.200.000 orang, dan seorang peneliti masalah Cina dari Universitas Nasional Singapura menduga ada 5.700.000 orang Tionghoa. Dari jumlah Tionghoa muslim tersebut, menurut pimpinan PITI mencapai lima persen, seorang pemerhati tentang Tionghoa muslim HM. Ali Karim memperkirakan Tionghoa Muslim hanya dua persen, dan seorang tokoh Tionghoa Muslim yang sangat terkenal yaitu Drs. H. Junus Jahya menduga penduduk Tionghoa Muslim hanya sekitar satu persen dari total penduduk Tionghoa di Indonesia.⁴⁷

Namun seiring berjalannya waktu, PITI mulai berkembang walaupun tidak mulus. Di Yogyakarta ada PITI korwil Yogya. PITI DIY didirikan pada tanggal 20 September 1970 atas inisiatif para pendiri dan pengurus PDHI (Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia) diantaranya adalah Prof. KH. Abd. Kahar Muzakir, GBPH. H. Prabu Ningrat, KH. M.Djoenaid, KH. R. Therus, KH. Muhadi Munawir, KH. Ali Maksum, dan Prof. Mukti Ali yang pada saat itu mereka mengajak Iksan Budisantoso dan Ahmad Sutanto yang merupakan keturunan Tionghoa Muslim untuk mendirikan PITI Yogyakarta sebagai lembaga dakwah untuk warga Tionghoa.⁴⁸

Kegiatan PITI DIY awalnya bergabung dengan kegiatan PDHI seperti pengajian rutin di kantor PDHI atau secara bergilir di rumah-rumah anggota PDHI dengan sarana dan prasarana dari PDHI pula. Selain itu PITI juga membantu orang Tionghoa yang mendapat masalah ketika baru masuk Islam/muallaf,

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*

misalnya ketika diusir oleh keluarganya. Contoh kasus adalah seorang muallaf perempuan bernama Be Han Nio asal dari Banyuwangi, karena tak ada dukungan dari keluarganya maka PITI DIY memberikan santunan pendidikan di salah satu lembaga pendidikan keperawatan di kota Yogyakarta.⁴⁹ Tampaknya organisasi yang baru berdiri ini menunjukkan antusiasme yang tinggi dari pengurusnya. Ketuanya, H. Iksan Budi Santoso dan Ahmad Sutanto, sekretarisnya secara terbuka mengakui sebagai orang Tionghoa muslim. Sehingga mereka sering diundang untuk menjadi penceramah pengajian/ustad di berbagai tempat hingga Kulon Progo dan Klaten. Bahkan setiap bulan Ramadhan jadwal mereka selalu padat untuk menjadi penceramah.

Pada periode pertama, pengurus PITI DIY diketuai oleh H. Iksan Budi Santoso dan wakilnya KH. Ali Maksum. Sedangkan sekretaris 1 dan 2 dijabat langsung oleh Ahmad Sutanto dan Moh Amien Mansoer. Kemudian bendaharanya dijabat oleh Yudi Kurniawan. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah menjadi keberatan dengan menggunakan 'Tionghoa' yang kesannya terlihat eksklusif dalam kepanjangan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Melalui surat Menteri Agama RI tertanggal 15 Juli 1972 No. MA/244/1972 atas nama H. A. Mukti Ali Menteri Agama saat itu, meminta untuk meniadakan usaha yang dapat menjurus ke arah eksklusifisme dan mempercepat proses asimilasi dan pembauran warga negara keturunan. Oleh karena itu, PITI pusat mengganti namanya menjadi Persatuan Iman Tauhid Indonesia yang merupakan masih satu spesies

⁴⁹ Fahmi Rafika Perdana.(2008). Integrasi Sosial Muslim Tionghoa: Studi atas Partisipasi PITI DIY dalam Gerakan Pembauran, (Skripsi) Yogyakarta: Mystico-PITI.

dengan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia.⁵⁰ Dan sekitar tahun 1980an PITI Yogyakarta mulai berkembang. Salah satu factor nya yaitu mengganti kepengurusan dengan yang baru dan didukung penuh financialnya oleh Bapak Budy Setyagraha yang menjabat sebagai ketuanya. Beliau yang merupakan sebagai pengusaha yang cukup sukses dan tidak sungkan untuk mengakui ketionghoannya didepan umum. Nampaknya beliau tidak merangkap sebagai penceramah melainkan lebih aktif dibidang sosial politik.⁵¹

Sebenarnya etnis Tionghoa di Yogyakarta sejak zaman Sultan Hamengkubuwono II sudah ada yang masuk Islam, kapiten Cina sekaligus Bupati Yogyakarta Tan Jin Sing, ia masuk Islam dan kemudian merubah namanya menjadi Raden Tumenggung Setjadiningrat. Menyikapi hal tersebut etnis Tionghoa sendiri merupakan salah satu etnis minoritas di tengah kemajemukan etnik di Indonesia. Selain itu ada juga pada jaman Oei Tek Biauww yang kemudian dikenal sebagai Kyai Tumenggung Reksonegoro. Ia adalah salah satu Bupati di Semarang, kemudian pindah ke Yogyakarta atas permintaan Sultan HB I. Selain itu Kyai Reksonegoro juga menjadi penasehat sultan dalam bidang kerohanian, termasuk mengurus dan memimpin perayaan adat atau agama seperti Grebeg⁵²

Selain itu pada bidang pendidikan, pada mulanya Indonesia juga tidak begitu peduli terhadap pendidikan orang Tionghoa. Sebenarnya tidak ada

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Ma'ruf Siregar di rumahnya, 11 Desember 2012, jam 15:11

⁵² Lihat Sejarah.kompasiana.com diakses pada 30 Oktober 2012

pengawasan terhadap sekolah-sekolah Cina. Namun, dengan adanya konsolidasi kekuasaan politiknya, pemerintah mulai meningkatkan perhatiannya terhadap sekolah-sekolah Cina. Diantaranya sekolah pro-Beijing dan pro-Taipei dan jumlahnya sekitar 2000 di seluruh Indonesia. Tahun 1957 pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan bahwa warga Negara Indonesia keturunan asing tidak diizinkan bersekolah di sekolah asing, yakni sekolah yang berbahasa Cina. Dari akibat peraturan tersebut sekitar 1.100 sekolah berbahasa Cina diubah menjadi sekolah Indonesia.⁵³

Setelah kejadian G30S/PKI merupakan titik balik dari sejarah Indonesia yang begitu panjang, di bidang social ini meliputi salah satunya yaitu pendidikan. Seperti yang telah di jelaskan diatas, banyak dari sekolah-sekolah yang mengajarkan bahasa Tionghoa ditutup dan pada akhirnya diambil alih oleh pemerintah. Dan akibatnya banyak anak-anak dari etnis Tionghoa tidak dapat mengenyam pendidikan, barulah pada tahun 1968 pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan Presiden No. B12/Pres/1/1968 peraturan tersebut berisi tentang pemberian izin mendirikan sekolah. Disamping itu juga pemerintah melarang agama dan adat istiadat etnis Tionghoa sekiranya sampai tahun 1968. Barulah pada tahun 1969 melalui UU No 5/1969 agama minoritas seperti Konghucu dan Budha menjadi status resmi.

⁵³ Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*, LP3ES, 1999. hlm.174.

D. Kondisi Budaya

Di setiap kebudayaan pasti selalu mempunyai beraneka ragam dan karakter yang khas menempel dalam kehidupan sehari-hari begitu juga dengan orang Tionghoa. Walaupun warisan budaya mereka berasal dari leluhur negeri Cina tetapi mereka selalu menghormati kebudayaan yang telah ada. Namun di era sebelum reformasi, kebudayaan asli mereka belum diperbolehkan tampil di publik Indonesia, karena banyaknya yang ditentang oleh peraturan pemerintah Indonesia. Namun lama-kelamaan kondisi tersebut bisa diterima oleh masyarakat pribumi.

Kondisi budaya yang dialami etnis Tionghoa dalam era Orde Baru dalam kebijakan pemerintah Indonesia yaitu adanya larangan film-film luar negeri yang khususnya berbahasa Mandarin, tidak sampai disitu, iklan yang menggunakan huruf Mandarin pun dilarang ditampilkan di khalayak ramai. Selain itu juga ada peraturan pemerintah yang melarang surat kabar berbahasa Mandarin terbit di Indonesia. Namun tak sedikit yang menuntut peraturan tersebut, alasannya klise, karena para pegawai yang bekerja di kantor surat kabar berbahasa Mandarin merasa kehilangan pekerjaan.

Di tahun 1967 juga keluar peraturan No. 14 tahun 1967 yaitu yang isinya melarang perayaan agama Konghucu yang merupakan notabene agama etnis Tionghoa serta pelarangan menggunakan aksara huruf Mandarin. Nah dari adanya peraturan tersebut warga etnis Tionghoa menjadi tidak leluasa melaksanakan ibadah. Kekecewaan yang dirasakan oleh aturan tersebut tidak langsung menyurutkan niat etnis Tionghoa untuk beribadah kepada Tuhan-Nya. Dari beberapa warga etnis Tionghoa juga merasa ingin adanya perbaruan asimilasi

dengan pribumi, alasannya agar mereka bisa berbaur dengan masyarakat pribumi sendiri.

Pada Orde Baru Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Kesenian barongsai secara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa Indonesia terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional karena pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Mereka pergi hingga ke Mahkamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung Indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia. Satu-satunya surat kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit adalah Harian Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer Indonesia dalam hal ini adalah ABRI meski beberapa orang Tionghoa Indonesia bekerja juga di sana. Agama tradisional Tionghoa dilarang. Akibatnya agama Konghucu kehilangan pengakuan pemerintah.⁵⁴

Bahasa Cina, sebenarnya tidak juga dianjurkan di Indonesia seperti yang telah dijelaskan diatas. Sebagai contoh di Jawa Timur, pihak militer

⁵⁴Lihat:<http://khabarsoutheastasia.com/id/articles/apwi/articles/features/2013/02/09/feature-02>. Penulis Hanny Hermawan. Diakses 6 Maret 2013.

menginstruksikan operator telepon untuk memutuskan pembicaraan yang berlangsung dalam bahasa Cina. Sebenarnya praktek ini sudah lama ditinggalkan, namun halnya aksara Cina masih dilarang juga untuk dipamerkan. Semua nama toko kini ditulis dalam bahasa Indonesia.⁵⁵

Karena bahasa Cina dianggap tidak sesuai dengan semangat nasional Indonesia. Pada akhir-akhir ini olahraga Cina seperti *Tai Chi* dan *Wai Tan Kung* sangat populer di etnis Tionghoa maupun penduduk pribumi yang tinggal di perkotaan. Selain itu juga lagu-lagu Cina juga digantikan dengan lagu-lagu Indonesia agar mudah mendunia Indonesia. Selain itu juga terdapat sebuah surat kabar yang disebut Koran Cina yang dikelola pemerintah Jakarta. Surat kabar tersebut terdiri dari delapan halaman, empat halaman diantaranya berisi dengan bahasa Cina. Tujuan pemerintah membuat Koran tersebut yang berbahasa Indonesia. Etnis Tionghoa menganggap Koran itu sebagai tempat memasang iklan.

Yogyakarta yang begitu kental dengan budaya Jawanya juga ada yang khas, yakni wayang. Ternyata wayang yang selama ini melekat di orang Jawa dapat juga di jumpai pada keturunan Tionghoa. Salah satunya wayang golek Potehi serta wayang Titi. Karena itu wayang ini hanya boleh dimainkan oleh laki-laki berdarah Tionghoa dan menggunakan bahasa mandarin.⁵⁶ Sedangkan untuk wayang Potehi merupakan pertunjukan boneka-boneka tangan yang kepala dan lengannya digerakkan oleh jari-jari yang di masukkan kedalamnya. Wayang Titi

⁵⁵ Wawancara dengan Pak Bambang dirumahnya, 4 Januari 2013, jam 15.10

⁵⁶ F. Seltman, "Wayang Titi, wayang Cina di Yogyakarta", Basis, Desember 1988, hlm. 467.

sendiri yang ada di Yogyakarta ini, lebih condong ke budaya Cina baik dari segi alur cerita maupun bentuk wujud nya.⁵⁷

Selain itu pada tahun 1940 di Yogyakarta terdapat prasasti yang didatangkan dari negeri Cina. Namun dalam perjalanan pengiriman prasasti tersebut mengalami keterlambatan karena pasukan Jepang menyerbu Cina. Prasasti tersebut mencantumkan tahun Cina Min-kuo 29, bulan 3 hari 18 serta dilengkapi candrasengkala yang berbunyi, “Jalma Wahana Dirada Hing Wungkalan. Arti dari kalimat tersebut adalah manusia naik gajah diatyas benda bundar”. Sang arsitek dari prasasti tersebut adalah delapan warga keturunan Cina dibawah pimpinan Lie Ngo An, kapten masyarakat Cina di Yogyakarta. Tujuan dari pengiriman prasasti tersebut karena mereka merasa berhutang budi kepada Sultan yang telah melindungi mereka sehingga mereka bisa menikmati hidup dengan tenang dan sejahtera di Yogyakarta. Sebenarnya tidak sampai di situ, masih banyak kebudayaan Tionghoa di Yogyakarta, seperti Imlek, Pe Chun, atraksi Barongsai dll. Namun karena pada zaman sebelum reformasi pemerintah melarangnya untuk tampil di publik, jadi ruang gerak untuk mementaskan kebudayaan mereka menjadi tersendat adanya aturan atau larangan-larangan yang belum dicabut. Begitu juga dengan Tionghoa yang muslim.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 470.